

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI JEPARA

tahun : 2024

PENILAIAN		Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan
A. PENGUNGKIT (60)		60		57,59	95,98%	
I. PEMENUHAN (30)		30		29,62	98,73%	
1. Manajemen Perubahan		4		4	100,00%	
i	Penyusunan Tim Kerja	0,5		0,5	100,00%	
	12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		YA	1		-SK tim zi -rapat persiapan zi -rapat seleksi tim zi Evidence -rapat perubahan Tim zi -acara ikrar bersama,komitmen bersama, pakta integritas,PKT th 2024 -monev area 1 -rapat seleksi tim zi -
	12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas		A	1		Evidence
ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1		1	100,00%	
	12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		YA	1		-rapat monev semua area Evidence
	12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		A	1		-rencana kerja -dokumen rencana aksi Evidence -TERDAPAT MEKANISME ATAU MEDIA UNTUK MENSOSIALISASIKAN PEMBANGUNAN -Media Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Melalui Media Sosial Website Pengadilan Negeri Jepara - dokumen apel dan rapat - dokumen PUBLIC CAMPAIGN ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI JEPARA
	12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan		A	1		Evidence
iii	WBK/WBBM	1		1	100,00%	

	12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	A	1		-dokumen rencana kerja Evidence
	12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	A	1		-dokumen monev zi Evidence
	12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	A	1		-MONEV ZI Evidence
iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1,5	1,5	100,00%	
	12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	YA	1		-SK role model -acara ttd pakta integritas -Foto role model -ruang tamu terbuka Evidence
	12b. Sudah ditetapkan agen perubahan	A	1		-sk agen perubahan -sk PENUNJUKKAN TIM SELEKSI AGEN PERUBAHAN -acara pemilihan agen perubahan -acara penyerahan piagam agen perubahan Evidence
	12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	A	1		-Monev 5R dan Kinerja Pegawai oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara Sebagai Role Model Evidence
	12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A	1		-acara ikrar bersama,komitmen bersama,pakta integritas,PKT -dokumen LHKPN -Dokumen SPT Evidence
2.	Penataan Tatalaksana	3,5	3,5	100,00%	
i	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1	1	100,00%	
	12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A	1		- Peta Bisnis - . SK Penetapan SOP - . SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan Evidence
	12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	A	1		1. Dokumen Standar Pelayanan PN Jepara 2. SK Standar Pelayanan 3.SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan Evidence

	12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A	1		Dokumen Monev SOP Evidence
ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	100,00%	
	12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	A	1		-PERUBAHAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP), Pengukuran Kinerja Melalui MIS, Pelaporan Keuangan, SIPP dan Evaluasi Implementasi SIPP Evidence
	12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	A	1		-TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) -screenshot Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Evidence
	12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	A	1		-SK PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) -screenshot E-Court yang digunakan untuk pelayanan bidang perdata - screenshot E-Berpadu -screenshot Eraterang - screenshot Sisuper Evidence
	12d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A	1		-monev spbe Evidence
iii	Keterbukaan Informasi Publik	0,5	0,5	100,00%	
	12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	A	1		SK PPID, SK Kimwasmart, SK pengeloa Website dan Medsos Evidence
	12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		-dokumen monev kebijakan keterbukaan informasi publik Evidence
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5	5	100,00%	

i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,25	0,25	100,00%	Peta jabatan Rapat Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja PN Jepara Tahun 2023 Rapat Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja PN Jepara Tahun 2023 Struktur Organisasi PN Jepara Hasil Analisis Jabatan Laporan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja
	12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	YA	1		Evidence SK KPN Penempatan pegawai tanggal 10 Nopember 2023 Rapat penempatan pegawai tanggal 10 Nopember 2023 SK Penempatan Pegawai No. 94/KPN/SK/6/2023 Evidence pengadaan tenaga pnpn SK Penempatan Pegawai No. 38/KPN/SK/2/2023 SK Mutasi keluar SK Mutasi masuk
	12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A	1		Evidence
	12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	YA	1		Evidence Rapat penempatan pegawai tanggal 10 Nopember 2023 Rapat monev penempatan pegawai tanggal 7 Juli 2023 Rapat monev penempatan pegawai tanggal 9 Pebruari 2023
ii	Pola Mutasi Internal	0,5	0,5	100,00%	Rapat Mutasi Internal tanggal 27 Okt 2023 Rapat penempatan pegawai tgl 10 Nop 2023 SK Penempatan pegawai tgl 15 Nop 2023 Monev Mutasi Internal tanggal 7 Juli 2023 SK penempatan Pegawai tanggal 16 Juni 2023 SK Mutasi pegawai SK Plt Panmud Hukum SK Plt Kasubbag Umum dan Keuangan Monev Mutasi Internal tanggal 9 Pebruari 2023 SK Plt. Panmud Hukum SK Bendahara Penerima SK Petugas PTSP
	12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar				

jabatan	YA	1	Evidence Rapat Mutasi Internal tanggal 27 Okt 2023 Rapat penempatan pegawai tgl 10 Nop 2023 SK Penempatan pegawai tgl 15 Nop 2023 Monev Mutasi Internal tanggal 7 Juli 2023 SK penempatan Pegawai tanggal 16 Juni 2023 SK Mutasi pegawai SK Plt Panmud Hukum SK Plt Kasubbag Umum dan Keuangan Monev Mutasi Internal tanggal 9 Pebruari 2023 SK Plt. Panmud Hukum SK Bendahara Penerima SK Petugas PTSP
12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	A	1	Evidence rapat mutasi internal tanggal 27 Oktober 2023 rapat monev mutasi internal tanggal 7 Juli 2023 rapat monev mutasi internal tanggal 9 Pebruari 2023
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	YA	1	Evidence
iii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1,25	1,25	100,00%
12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	YA	1	Evidence Notulen monev tanggal 7 Juli 2023 TNA tanggal 10 Juli 2023 Notulen rapat TNA tanggal 9 Pebruari 2023 TNA tanggal 9 Pebruari 2023
12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A	1	Evidence rencana pengembangan kompetensi pegawai tanggal 10 Juli 2023 rencana pengembangan kompetensi pegawai tanggal 9 Pebruari 2023

	12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A	1		analisis kesenjangan kompetensi pegawai tanggal 10 Juli 2023 rekapitulasi kesenjangan kompetensi pegawai tanggal 10 Juli 2023 analisis kesenjangan kompetensi pegawai tanggal 9 Pebruari 2023 rekapitulasi kesenjangan kompetensi pegawai tanggal 9 Pebruari 2023 Evidence
	12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	A	1		data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023 surat tugas surat panggilan diklat Evidence
	12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	A	1		pelatihan pelayanan 3 S petugas PTSP oleh BTN Evidence monev pengembangan kompetensi tanggal 7 Juli 2023 monev pengembangan kompetensi tanggal 12 Pebruari 2023 Evidence
iv	Penetapan Kinerja Individu	2	2	100,00%	
	12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	A	1		perjanjian kinerja seluruh hakim dan pegawai Evidence
	12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A	1		Evidence
	12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1		Penilaian Kinerja Pegawai oleh atasan langsung setiap bulan Evidence

	12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	YA	1		notulen pemberian penghargaan agen perubahan notulen pemberian reward petugas PTSP notulen pemberian reward Hakim, PP dan JS dengan minutasai terbaik SK agen perubahan notulen pemberian penghargaan agen perubahan semester II tahun 2023
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode				Evidence
v	Perilaku Pegawai	0,75	0,75	100,00%	
	12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1		absensi online sikep absensi manual surat cuti surat tugas surat ijin keluar kantor surat ijin pulang cepat PerMA no 7 Tahun 2016 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang kode etik dan perilaku Hakim SK KMA tentang kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Juru sita Sosialisasi PerMA 7, 8, 9 tahun 2016 SK KPN tentang penerapan 5 R SK KPN tentang Penetapan jam kerja
vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0,25	0,25	100,00%	Evidence
	12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	A	1		update kelengkapan data sikep pembaharuan data pegawai update data pegawai sikep bisa diakses oleh semua pegawai
	4. Penguatan Akuntabilitas	5	5	100,00%	Evidence
i	Keterlibatan Pimpinan	2,5	2,5	100,00%	1. Dokumen Keterlibata Pimpinan dalam Penyusunan Perencanaan 2. Dokumen Penyusunan Sakip 3. Dokumen Penyusunan Anggaran
	12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	A	1		Evidence

	12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	A	1		1. Dokumen Rapat Penyusunan Kinerja 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Dokumen LKJIP Evidence
	12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		1. Dokumen rapat berjenjang Evidence
ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2,5	2,5	100,00%	
	12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	YA	1		1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2. Dokumen Rencana Program Kerja Evidence
	12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	YA	1		1. rapat sakip 2. doukem reuiu restru 3. LHE sakip 4. PKT Evidence
	12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	YA	1		1. rapat sakip 2. dokumen IKU Evidence
	12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	A	1		1. Dokumen IKU 2. Dokumen Evaluasi SAKIP Evidence
	12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1		1. penyampaian dokumen sakip - penyampaian dokumen Laptah Evidence
	12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1		1. rapat sakip 2. rapat komdanas 3. dokumen LKJIP 4. PKT Evidence
	12g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	YA	1		1. dokumen rapat sakip 2. dokumen Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 3. dokumen sosialisasi sakip Evidence

	12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja	A	1		1.rapat saking 2.rapat komdanas 3.sk Penunjukan / Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023 4.niali capaian kinerja komdanas
					Evidence
5.	Penguatan Pengawasan	7,5	7,12	94,93%	
i	Pengendalian Gratifikasi	1,5	1,5	100,00%	
	12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1		-dokumen public camping Evidence
	12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A	1		-sk PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI -SKPEDOMAN PENGENDALI GRATIFIKASI -SK PEMUTARAN AUDIO HIMBAUAN PENOLAKAN GRATIFIKASI -SOP PEMBACAAN HIMBAUAN PENOLAKAN GRATIFIKASI DALAM PERSIDANGAN -LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI -monev gratifikasi triwulan 1-4 - dokumen laporan pengendalian gratifikasi Evidence
ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,5	1,12	75,00%	
	12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	B	0,75		- rencana kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -SK PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) -PELAKSANAAN RAPAT BERJENJANG Evidence
	12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	B	0,75		-PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RESIKO - LAPORAN IDENTIFIKASI RISIKO Evidence
	12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah				-LAPORAN IDENTIFIKASI RISIKO

	diidentifikasi	B	0,5		Evidence
	12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A	1		-SOSIALISASI SPIP Evidence
iii	Pengaduan Masyarakat	1,5	1,5	100,00%	-SK PERUBAHAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS DAN SP4N LAPOR -RAPAT SOSIALISASI PENGADUAN MASYARAKAT
	12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	A	1		Evidence MONEV PENGADUAN MASYARAKAT
	12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	YA	1		Evidence
	12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A	1		-monev pengaduan masyarakat Evidence
	12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1		-MONEV PENANGANAN PEBGADUAN MASYARAKAT Evidence
iv	Whistle-Blowing System	1,5	1,5	100,00%	-SOSIALISASI Whistle Blowing System telah diterapkan
	12a. Whistle Blowing System telah diterapkan	A	1		Evidence -MONEV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
	12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A	1		Evidence -MONEV PENANGANAN PENGADUAN MAMSYARAKAT
	12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1		Evidence
v	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5	1,5	100,00%	-PETA RISIKO -PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN -SK PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN
	12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan				

	benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A	1		Evidence -SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
	12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A	1		Evidence MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
	12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A	1		Evidence -MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
	12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A	1		Evidence -MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
	12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1		Evidence
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	100,00%	
i	Standar Pelayanan	1	1	100,00%	
	12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A	1		-Sk standar pelayanan -monev standar pelayanan Evidence -foto maklumat pelayanan -foto komitmen bersama
	12b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A	1		Evidence -monev standar pelayanan -foto monev standar pelayanan
	12c. Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan	A	1		Evidence 1. Dokumen Terkait Publikasi Maklumat Pelayanan Di Website
	12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	YA	1		Evidence
ii	Budaya Pelayanan Prima	1	1	100,00%	
	12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	A	1		Dokumen Pelaksanaan MoU Dengan SLB, Pelatihan 3s Evidence

	12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A	1		Pelayanan Bisa Diakses Secara Online Baik di Website Dan Medsos Evidence
	12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	A	1		1.Surat Tim Reward 2.Piagam Penghargaan 3.Surat Keputusan Kompesasi Keterlambatan Pelayanan 4.Eviden Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Publik Evidence
	12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		1. Dokumen Nomor Prioritas 2. Kompesasi Terhadap Layanan Yang Tertunda Evidence
	12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A	1		-terdapat layanan terpadu -sop PTSP Evidence -dokumen pendattaran surat kuasa secara online -dokumen PTSP ONLINE -SK duta pelayanan - terdapat inovasi pelayanan pengguna aplikasi e-berpadu
	12f. Terdapat inovasi pelayanan	A	1		Evidence
iii	Pengelolaan Pengaduan	1	1	100,00%	
	12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	A	1		1. Tampilasn Aplikasi E-court 2. Aplikasi Layanan Eraterang 3. Tamilan Layanan Survey Elektronik Evidence
	12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	A	1		-sk SP4N-LAPOR --Tampilan SP4N LAPOR Evidence -Eviden Tindak lanjut Terhadap Laporan Pelayanan -PERUBAHAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS DAN SP4N LAPOR
	12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A	1		Evidence
iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1	1	100,00%	
	12a. Telah dilakukan survey kepuasan				- SK Tim IPAK & IKM -Rapat monev ipak & ikm - foto hasil survey ipak & ikm

	masyarakat terhadap pelayanan	A	1		Evidence Laporan Hasil Survey Sudah Termuat di Website,dan Medsos PN Jepara
	12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1		Evidence
	12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A	1		Dokumen Laporan Monev IPAK DAN IKM Evidence
v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	1	100,00%	
	12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1		1. Eviden Aplikasi Surat Keterangan Melalui ERATERANG 2.Eviden Pelayanan Menggunakan Aplikasi PTSP Untuk Surat Masuk dan Surat Keluar Evidence
	12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	YA	1		-SK (E-BERPADU) - SK PENNGAWAS DAN PETUGAS PELAYANAN MEJA E COURT - SK (SIPP) Evidence 1. Dokumen SIPP 2. Dokumen Aplikasi Online, Ecourt, Esummon, Elitigasi,Efilling, Banding Ecourt
	12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	A	1		Evidence
II. REFORM (30)		30	27,97	93,23%	
1. Manajemen Perubahan		4	4	100,00%	
i	Komitmen dalam perubahan	2	2	100,00%	
	a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)				-DOKUMEN AGEN PERUBAHAN Evidence
	- Isi Jumlah Agen Perubahan				
	- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat	I	1		
	b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	I	1		DOKUMEN AGEN PERUBAHAN Evidence
ii	Komitmen Pimpinan	1	1	100,00%	

	a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	A	1		DOKUMEN LKE Evidence
iii	Membangun Budaya Kerja	1	1	100,00%	
	a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	A	1		-IMPLEMENTASI 8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI JEPARA - DOKUMEN SOP Evidence
2.	Penataan Tatalaksana	3,5	2,67	76,29%	
	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi				
i	Penyederhanaan Jabatan	0,5	0,5	100,00%	
	a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	A	1		-peta bisnis -sk penempatan pegawai Evidence
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
ii	yang Terintegrasi	1	1	100,00%	1. SK PENGAWAS DAN ETOSAS PELAYANAN MEJA E COURT 2. sk PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU) 3. sk PENUNJUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) 4. Alur Pendaftaran Perkara Perdata Menggunakan Aplikasi E-COURT Evidence
	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A	1		Evidence
	b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	A	1		-screenshot PELAYANAN PUBLIK DIWEBSITE Evidence
iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2	1,17	58,33%	

	a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	D	0,25		1.TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIDANG PROSES BISNIS UTAMA TELAH MAMPU MEMBERIKAN NILAI MANFAAT BAGI UNIT KERJA SECARA OPTIMAL 2.screenshot Pendaftaran Perkara perdata diajukan melalui aplikasi E-Court 3.screenshot Pendaftaran Perkara perdata diajukan melalui aplikasi E-Court Persidangan Perdata dilakukan secara elektronik (E-Litigasi) 4.screenshot Pengadministrasian perkara menggunakan Aplikasi SIPP Evidence
	b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	A	1		1.TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH MAMPU MEMBERIKAN NILAI MANFAAT BAGI UNIT KERJA SECARA OPTIMAL Evidence
	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	C	0,5		TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIDANG PELAYANAN PUBLIK TELAH MAMPU MEMBERIKAN NILAI MANFAAT BAGI UNIT KERJA SECARA OPTIMAL Evidence
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5	5	100,00%	
i	Kinerja Individu	1,5	1,5	100,00%	
	a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	A	1		1.Absensi Online 2.absensi manual 3.surat cuti 4.suarat tugas 5.suarat izin keluar kantor 6.PKP semua pegawai 7.e kinerja semua pegawai 8. fakta intergritas seluruh pegawai 9.Perjanjian kinerja tahunan 2023 seluruh pegawai Evidence
ii	Assessment Pegawai	1,5	1,5	100,00%	

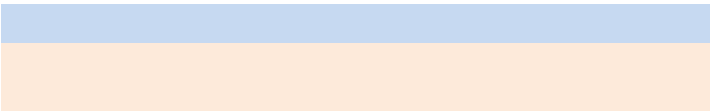
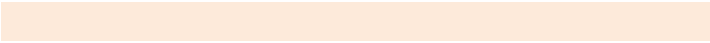
	a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	A	1		Notulen Monev Baperjakat 11 Juli 2023 Notulen Rapat Baperjakat 14 Nopember 2022 Usul Pengangkatan Panmud a.n. Aditya SK Panmud Aditya Usul Pengangkatan Panmud a.n. Eko Budhi SK Panmud Eko Budhi
iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	2	2	100,00%	Evidence
	a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	I	1		rekapitulasi absensi data personalia laporan penegakan disiplin surat ijin keluar surat ijin pulang cepat
4.	Penguatan Akuntabilitas	5	4	80,00%	Evidence
i	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2	1	50,00%	
	a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	I	0,5		Dokumen Capaian Kinerja LKJIP 2023,Laporan Kinerja Bulanan
ii	Pemberian Reward and Punishment	1,5	1,5	100,00%	Evidence
	a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	A	1		1. Dokumen RKT, Dokumen PKT, 2. Dokumen SK Reward dan Punishment 3. Dokumen Pemberian Reward dan Punishment
iii	Kerangka Logis Kinerja	1,5	1,5	100,00%	Evidence
	a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?	A	1		1. Dokumen IKU, Peta Bisnis ,
5.	Penguatan Pengawasan	7,5	7,3	97,33%	Evidence
i	Mekanisme Pengendalian	2,5	2,5	100,00%	
	a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	A	1		-RKT -SK (SPIP) -RENCANA KERJA SPIP
ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3	3	100,00%	Evidence

	a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	I	1		-dokumen rapat pengaduan masyarakat -cheklist monev pengaduan masyarakat Evidence
iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2	1,8	90,00%	
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	I	0,94		laporan LHKPN 2023 Evidence
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I	0,86		DOKUMEN SPT 2023 Evidence
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	100,00%	
i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,5	2,5	100,00%	
	a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:				1.DOKUMEN IKM 2.Pengumuman Melalui Audio 3.Tampilan Layanan Laporan Elektronik SIWAS Evidence
	1. Kesesuaian Persyaratan				
	2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur				
	3. Kecepatan Waktu Penyelesaian				
	4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis				
	5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan				
	6. Kompetensi Pelaksana/Web				
	7. Perilaku Pelaksana/Web				
	8. Kualitas Sarana dan prasarana				
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	A	1		
	b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:				DOKUMEN PERMOHONAN PELAYANAN Evidence
	1. Waktu lebih cepat				
	2. Pelayanan Publik yang terpadu				
	3. Alur lebih pendek/singkat				
	4 Terintegrasi dengan aplikasi		100	1	

ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2,5		2,5	100,00%	
	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	A		1		Evidence
TOTAL PENGUNGKIT		60		29,62	98,73%	
B. HASIL (40)		40		38,36	95,90%	
1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		20		21,21	94,27%	
						IPAK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5	3,99	17,46	99,75%	Evidence
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	3,75	3,75	75,00%	Evidence
						1.DOKUMEN LKjIP 2023
2. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		20		17,15	98,00%	
						IKM
	a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5	3,92	17,15	98,00%	Evidence
TOTAL HASIL		40		38,36	95,90%	
Nilai Pembangunan ZI		100		95,95	95,95%	

Catatan Evaluator Pendahuluan

Catatan Evaluator Bawas



Orange bar

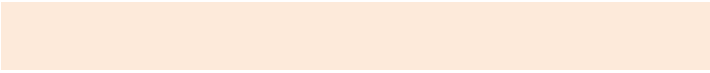
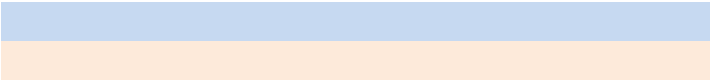
Orange bar

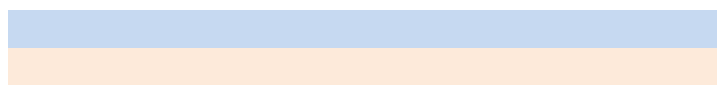
Blue bar

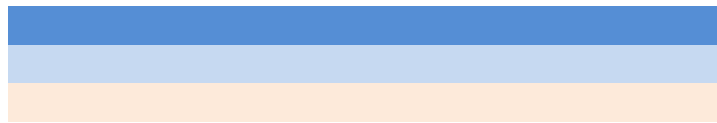
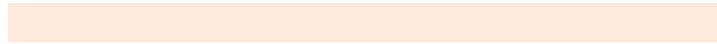
Orange bar

Orange bar

Blue bar
Orange bar





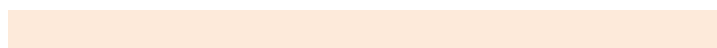
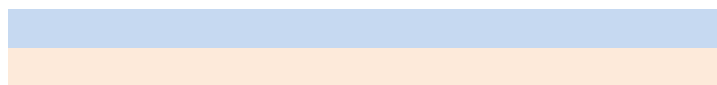


Orange bar

Blue bar
Orange bar

Orange bar

Orange bar



Orange bar

Blue bar
Orange bar

Orange bar

Orange bar

Blue bar
Orange bar

Orange bar

Orange bar

Blue bar
Orange bar

